

Modal Sosial, Komunikasi, dan *Capacity Building* dalam Era Masyarakat Digital: Kajian pada Program Kampung Lingkar Kampus (Klk) di Kelurahan Ketawanggede Kota Malang

Mofit Jamroni¹, Nufaisah Aufa Azzahra¹, Redy Eko Prasetyo², R.Agung Harjaya²

¹Program Studi Magister Sosiologi, FBiPK Universitas Brawijaya, Malang

²Fasilitator Program Kampung Lingkar Kampus, Universitas Brawijaya, Malang

ABSTRAK

Keberhasilan program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat serta kualitas interaksi sosial yang terbangun. Penelitian ini mengkaji peran modal sosial dalam mendukung capacity building pada Program Kampung Lingkar Kampus (KLK) di Kelurahan Ketawanggede, dengan mempertimbangkan efektivitas media komunikasi dan mengintegrasikan perspektif Network Society (Castells, 2010) serta digital citizenship (Mossberger et al., 2008). Metode yang digunakan adalah metode kepustakaan (library research) dengan data dari jurnal ilmiah lima tahun terakhir dan dokumen resmi Program KLK Universitas Brawijaya Tahun 2026, dianalisis secara deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa: pertama, modal sosial berperan sebagai fondasi kapasitas kolektif melalui kepercayaan dan jaringan bonding–bridging; kedua, Program KLK beroperasi sebagai networked social practice di mana mahasiswa berfungsi sebagai penghubung (switcher) antarjaringan; ketiga, media komunikasi digital memperkuat etika digital warga sekaligus memperluas kapasitas partisipasi komunitas. Integrasi modal sosial, jaringan digital, dan etika digital menjadi kunci efektivitas dan keberlanjutan Program KLK.

Kata kunci: Modal sosial; capacity building; komunikasi; Program KLK; pemberdayaan masyarakat.

ABSTRACT

The success of empowerment programs is greatly influenced by community involvement and the quality of social interactions. This study examines the role of social capital in supporting capacity building in the Kampung Lingkar Kampus (KLK) Program in Ketawanggede Village, considering the effectiveness of communication media and integrating perspectives from Network Society (Castells, 2010) and digital citizenship (Mossberger et al., 2008). A library research method was applied using scientific journals from the past five years and official documents of the KLK Program, analyzed descriptively. The results show that: first, social capital functions as a collective capacity foundation through trust and bonding–bridging networks; second, KLK operates as a networked social practice in which students function as network switchers; third, digital communication media strengthens

community members' digital citizenship and expands participatory capacity. The integration of social capital, digital networks, and digital citizenship constitutes the key to the effectiveness and sustainability of the KLK Program.

Keywords: *Social capital; capacity building; communication; KLK Program; community empowerment.*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan masyarakat pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada aspek fisik dan ekonomi, melainkan juga pada penguatan kapasitas individu dan kolektif agar mampu mencapai kemandirian serta keberlanjutan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembangunan, bukan sekadar objek penerima manfaat. Dengan demikian, pembangunan masyarakat merupakan proses multidimensi yang melibatkan intervensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan secara terpadu guna meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan (Philip *et al.*, 2025). Dalam perspektif ini, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan secara mandiri. Perubahan tersebut semakin memperoleh relevansi dalam konteks era masyarakat jaringan (*network society*) yang dikemukakan oleh Castells (2010), di mana berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan komunikasi semakin tersusun melalui jaringan digital yang bersifat otonom serta melampaui batas-batas geografis komunitas. Dalam era tersebut, kemampuan komunitas untuk berpartisipasi dalam jaringan digital atau yang disebut Mossberger *et al.* (2008) sebagai *digital citizenship* menjadi faktor penentu baru keberhasilan pembangunan masyarakat.

Salah satu pendekatan krusial dalam pembangunan masyarakat adalah *capacity building*. Konsep ini dapat memperkuat kapasitas individu maupun organisasi melalui suatu proses yang memungkinkan mereka untuk memperoleh, mengembangkan, serta mempertahankan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang diperlukan guna menjalankan fungsi secara efektif (Deprez *et al.*, 2023). *Capacity building* tidak hanya berkaitan dengan peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup penguatan aspek kelembagaan, kepemimpinan, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial dan teknologi. Dalam kerangka *network society*, kemampuan adaptasi terhadap teknologi digital menjadi dimensi baru *capacity building* yang tidak dapat diabaikan, komunitas yang mampu memanfaatkan jaringan digital secara produktif memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mengakses sumber daya, pengetahuan, dan peluang dari ekosistem yang lebih luas (Castells, 2010). Penelitian menunjukkan *capacity building* yang dirancang secara partisipatif terbukti efektif dalam menjamin keberlanjutan program melalui penumbuhan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) serta tanggung jawab kolektif masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan jangka panjang (Zubaidah *et al.*, 2024). Keterlibatan aktif warga dalam setiap tahapan program, mulai dari pengambilan keputusan hingga implementasi, memastikan bahwa inisiatif tersebut selaras dengan kebutuhan nyata di tingkat lokal sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus dan lebih efisien (Mozin dan Abdussamad, 2025).

Namun, keberhasilan *capacity building* sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi dalam menyampaikan informasi, inovasi, dan pengetahuan kepada masyarakat (Juwita *et al.*, 2025). Komunikasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai aktor pembangunan, baik pemerintah, akademisi, maupun masyarakat (Juwita *et al.*, 2025). Aspek digital dalam komunikasi menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan konsep *digital citizenship*, yaitu kemampuan sekaligus hak warga negara untuk memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dalam berpartisipasi pada berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan politik (Mossberger *et al.*, 2008). Warga yang memiliki kompetensi dan etika digital tidak sekadar mengonsumsi informasi secara pasif, tetapi mampu memproduksi pengetahuan, membangun jaringan, dan berkontribusi secara aktif dalam proses pemberdayaan komunitas. Studi menunjukkan bahwa penggunaan kombinasi media komunikasi, baik digital maupun interpersonal, mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap inovasi sehingga mempercepat proses adopsi (Tripathi, 2025). Meski demikian, hubungan antara komunikasi dan inovasi dalam konteks pembangunan masyarakat masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut, baik secara teoretis maupun empiris (Costin, 2025).

Modal sosial merujuk pada sumber daya yang tertanam dalam jaringan sosial (*network*), termasuk kepercayaan (*trust*), norma atau nilai, dan interaksi yang memfasilitasi kolaborasi antarindividu dalam komunitas (Enderle, 2024). Menurut Castells (2010), modal sosial komunitas tidak lagi terbatas pada ruang geografis tertentu. Perkembangan teknologi digital memungkinkan modal sosial dibangun, dipelihara, dan diperkuat melalui jaringan yang menghubungkan kapasitas lokal dengan berbagai sumber daya yang tersedia pada tingkat global. Di era digital, peran modal sosial tetap relevan bahkan semakin penting sebagai katalisator partisipasi masyarakat di tengah meningkatnya kecenderungan individualisme (Rizky *et al.*, 2026). Modal sosial memiliki dua dimensi utama, yaitu *bonding* yang memperkuat kohesi internal kelompok serta *bridging* yang memperluas akses hubungan dengan pihak eksternal (Nguyen *et al.*, 2025). Tingginya modal sosial dalam komunitas terbukti mendukung keberhasilan implementasi program pemberdayaan melalui penguatan jaringan dan kolaborasi (Laila dan Sugito, 2025). Implementasi nyata dari konsep-konsep tersebut dapat dilihat pada Program Kampung Lingkar Kampus (KLK) di Kelurahan Ketawanggede yang berbasis kolaborasi antara perguruan tinggi Universitas Brawijaya dan masyarakat sekitar. Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui berbagai kegiatan pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan berbasis potensi lokal (Universitas Brawijaya, 2026).

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji modal sosial, komunikasi, dan *capacity building* secara terpisah. Namun, kajian yang mengintegrasikan ketiga elemen tersebut dengan perspektif *network society* dan *digital citizenship* dalam konteks program universitas–komunitas di Indonesia masih sangat terbatas. Selain itu, kegagalan dalam mengintegrasikan strategi komunikasi yang tepat terbukti menghambat proses difusi inovasi di tingkat komunitas (Handayani *et al.*, 2023). Tanpa dukungan komunikasi interpersonal yang kuat, sulit untuk membangun kepercayaan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bentuk dan peran modal sosial dalam mendukung *capacity building* pada Program KLK, dengan mempertimbangkan efektivitas media komunikasi dan mengintegrasikan

perspektif *network society* serta *digital citizenship*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis dalam pengembangan kajian pembangunan masyarakat, maupun secara praktis sebagai rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas program pemberdayaan berbasis komunitas.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yaitu pendekatan yang mengandalkan sumber-sumber tertulis sebagai data utama. Data dalam penelitian ini didominasi oleh data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui kajian literatur, kemudian dianalisis secara deskriptif. Metode ini dipilih untuk mengkaji hubungan konseptual antara modal sosial, komunikasi, dan *capacity building* serta relevansinya dengan perspektif *network society* dan *digital citizenship* tanpa pengumpulan data lapangan. Data primer berupa aktivitas kegiatan yang didukung dokumen resmi Petunjuk Teknis Program KLK Universitas Brawijaya Tahun 2026, sedangkan data sekunder berasal dari buku ilmiah dan artikel jurnal lima tahun terakhir yang relevan dengan tema kajian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Modal Sosial dalam Program Kampung Lingkar Kampus

Modal sosial menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan Program Kampung Lingkar Kampus (KLK), khususnya dalam membangun kolaborasi antara masyarakat dan perguruan tinggi. Modal sosial adalah sumber daya potensial yang terdiri dari beberapa aspek dari struktur sosial yang eksistensinya membantu individu yang tergabung dalam struktur sosial, meliputi asosiasi yang bersifat horizontal, kemampuan komunitas dalam menjamin manfaat, informasi, norma, nilai, resiprositas, kerja sama, dan *network* (Risal *et al.*, 2025). Menurut Risal *et al.* (2025), resiprositas adalah hubungan timbal balik dalam suatu kelompok yang tidak selalu dalam bentuk fisik, sementara perilaku proaktif individu berperan penting dalam mempengaruhi motivasi kolektif. Meskipun program KLK telah dirancang secara kolaboratif melalui berbagai aktivitas komunitas, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kualitas interaksi sosial yang terbangun.

Kepercayaan dan jaringan sosial berperan penting dalam mendorong partisipasi kolektif serta memperkuat koordinasi dalam program pemberdayaan masyarakat (Syarifuddin, 2025; Lestari *et al.*, 2025; Wijayanti *et al.*, 2025). *Bonding social capital* dibangun melalui kepercayaan dan kerja sama internal, sementara *bridging social capital* memungkinkan akses terhadap sumber daya eksternal dalam proses pemberdayaan masyarakat (Chen *et al.*, 2025). Menurut perspektif *network society* (Castells, 2010), modal sosial pada komunitas masa kini telah bergeser dari orientasi yang semata-mata teritorial menuju struktur berbasis jaringan, di mana kapasitas lokal warga Ketawanggede diperkuat melalui keterhubungan digital dengan sumber daya, informasi, dan pengetahuan yang tersedia dalam ekosistem yang lebih luas. Sehingga modal sosial tidak hanya menjadi pendukung, tetapi juga prasyarat keberhasilan KLK, dengan tantangan utama pada pengembangannya secara organik di masyarakat.

3.2. Program KLK sebagai Networked Social Practice: Perspektif Network Society

Castells (2010) menjelaskan bahwa masyarakat kontemporer semakin diorganisasi melalui jaringan yang memungkinkan informasi, sumber daya, dan relasi sosial mengalir melampaui batas-batas fisik. Dalam perspektif ini, Program KLK dapat dipandang sebagai praktik sosial berbasis jaringan (*networked social practice*) yang menghubungkan universitas, mahasiswa, dosen, masyarakat, dan pemerintah kelurahan dalam suatu ekosistem kolaboratif. Penelitian Fauzan *et al.* (2025) menunjukkan bahwa penggunaan media komunikasi digital mampu memperluas interaksi sosial, memperkuat jaringan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Hasil tersebut mendukung argumentasi Castells bahwa konektivitas digital menjadi mekanisme penting dalam pembentukan dan penguatan jejaring sosial di era masyarakat jaringan.

Dalam perspektif *network society* Castells (2010) mahasiswa dan dosen atau PIC dalam program KLK dapat diposisikan sebagai *switcher*, yaitu aktor yang menjembatani berbagai jaringan sosial yang berbeda, seperti jaringan akademik tematik institusi perguruan tinggi dengan komunitas lokal, dan pemerintah ditingkat kelurahan. Peran ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, pengetahuan, dan sumber daya secara lebih efektif antar jaringan yang sebelumnya terpisah. Difusi inovasi pada dasarnya merupakan proses komunikasi yang sangat bergantung pada efektivitas penyampaian informasi dan interaksi sosial dalam jaringan tersebut (Octory, 2025). Tanpa kehadiran *switcher* yang memulai arus pengetahuan dari universitas ke komunitas akan terputus, dan program KLK berisiko tidak mencapai dampak transformatif yang diharapkan. Sebaliknya, ketika PIC program berhasil menjalankan peran *switcher* secara efektif, jaringan KLK menjadi apa yang Castells (2010) sebut sebagai *network of networks* yaitu sistem jaringan berlapis yang semakin meningkatkan resiliensi dan kapasitas komunitas secara keseluruhan.

Di era digital, peran modal sosial semakin relevan sebagai katalisator partisipasi masyarakat di tengah meningkatnya kecenderungan individualisme (Rizky *et al.*, 2026). Jaringan digital Program KLK yang meliputi grup WhatsApp, media sosial, dan papan informasi digital tidak menggantikan relasi sosial tradisional komunitas Kelurahan Ketawanggede, melainkan memperkuat dan memperluas. Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa kegagalan dalam mengintegrasikan strategi komunikasi yang tepat dapat menghambat proses difusi inovasi di tingkat komunitas (Handayani *et al.*, 2023). Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan jaringan digital dalam Program KLK bukan aktivitas teknis semata, melainkan merupakan praktik sosial yang menentukan kualitas modal sosial dan keberlanjutan program secara keseluruhan yang ditekankan pada aspek pemberdayaan SDM dan pendidikan, penguatan ekonomi lokal dan UMKM, peningkatan infrastruktur dan lingkungan, serta penguatan sosial dan kelembagaan.

3.3. Digital Citizenship dalam Program Kampung Lingkar Kampus

Konsep *digital citizenship* yang dikembangkan Mossberger *et al.* (2008) mendefinisikan partisipasi digital sebagai kapasitas dan hak warga untuk menggunakan teknologi informasi secara penuh dan bertanggung jawab dalam etika kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Warga yang memiliki kompetensi menggunakan digital tidak sekadar mengonsumsi

informasi secara pasif, tetapi mampu memproduksi pengetahuan, membangun jaringan, dan berkontribusi secara aktif dalam proses pemberdayaan komunitas. Perspektif ini menambahkan dimensi normatif yang penting pada analisis Program KLK yaitu keterlibatan warga Kelurahan Ketawanggede dalam *platform* digital bukan sekadar soal akses teknologi, melainkan tentang pembentukan identitas kewargaan digital yang aktif, produktif dan bertanggung jawab.

Penelitian Fatimah *et al.* (2025) menunjukkan bahwa media komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga memperkuat partisipasi dan jaringan sosial dalam komunitas. Konteks pada Program KLK, kemampuan digital warga Ketawanggede tumbuh melalui dua mekanisme yang saling menguatkan: *pertama*, fasilitasi langsung oleh mahasiswa dan fasilitator yang mendampingi penggunaan platform digital dalam kegiatan komunitas; *kedua*, penguatan kepercayaan komunal yang memungkinkan warga lebih berani berpartisipasi di ruang digital. Selain itu, penelitian Fauzan *et al.* (2025) menunjukkan bahwa media komunikasi digital terbukti mampu memperluas interaksi sosial, memperkuat jaringan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan *digital citizenship* di tingkat komunitas.

Penting untuk digarisbawahi bahwa *digital citizenship* tidak dapat dibangun tanpa fondasi modal sosial yang kuat. Kepercayaan antarwarga (*bonding*) dan kepercayaan antara warga dengan mahasiswa pendamping (*bridging*) menjadi prasyarat psikososial yang memungkinkan warga merasa aman untuk berpartisipasi secara digital. Sejalan dengan penelitian Carmen *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan dan kualitas hubungan interpersonal memiliki pengaruh penting terhadap keterlibatan masyarakat dalam tindakan kolektif. Dengan demikian, komunikasi tatap muka melalui pertemuan warga, diskusi kelompok, maupun kegiatan pendampingan langsung tetap memegang peranan sentral dalam membangun partisipasi komunitas. Interaksi digital tidak sepenuhnya dapat menggantikan fungsi tersebut, melainkan perlu diintegrasikan dengan saling melengkapi.

3.4. Proses *Capacity Building* dalam Program Kampung Lingkar Kampus

Capacity building dalam Program KLK merupakan proses peningkatan kapasitas masyarakat secara multidimensi melalui pilar : pemberdayaan SDM dan pendidikan, penguatan ekonomi lokal dan UMKM, peningkatan infrastruktur dan lingkungan, serta penguatan sosial dan kelembagaan. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jenis kegiatan, tetapi juga metode pendekatan yang digunakan. Pengembangan *capacity building* merupakan proses multidimensi yang melibatkan berbagai aktor dan sektor, serta membutuhkan pendekatan partisipatif agar mampu berjalan efektif dan berkelanjutan. Selain itu, *capacity building* yang efektif memerlukan dukungan modal sosial.

Secara perspektif *network society*, *capacity building* yang efektif tidak lagi terbatas pada penguatan kapasitas teknis-konvensional, melainkan juga mencakup kapasitas komunitas untuk berpartisipasi secara produktif dalam jaringan digital. Inilah titik temu antara *capacity building* dan *digital citizenship*: ketika warga Ketawanggede mampu menggunakan platform digital untuk mengakses informasi program, melaporkan perkembangan kegiatan, dan berinteraksi dengan mahasiswa pendamping secara asinkron, mereka secara bersamaan

meningkatkan kapasitas teknis (*capacity building*) dan kapasitas dalam partisipasi digital (*digital citizenship*). Pendekatan partisipatif terbukti lebih efektif dibandingkan model *top-down* karena menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif (Zubaidah *et al.*, 2024; Mozin dan Abdussamad, 2025). *Capacity building* dan modal sosial merupakan dua aspek yang saling terkait dalam menentukan keberhasilan KLK, dengan jaringan digital sebagai infrastruktur yang mengakselerasi proses tersebut.

3.5. Integrasi Modal Sosial, Komunikasi, dan *Capacity Building*: Kerangka Konseptual

Analisis menunjukkan bahwa modal sosial, komunikasi, dan *capacity building* memiliki hubungan yang saling terkait dalam proses pemberdayaan masyarakat. Modal sosial menjadi fondasi melalui kepercayaan dan jaringan, komunikasi berperan sebagai penghubung antaraktor, dan *capacity building* merupakan hasil dari interaksi tersebut. Temuan Dulkiah (2025) menunjukkan bahwa modal sosial (*trust* dan *network*) berpengaruh signifikan terhadap pengembangan masyarakat dan partisipasi, serta menjadi penghubung penting dalam proses pemberdayaan.

Perspektif *network society* dan *digital citizenship* menambahkan dua dimensi baru pada hubungan interdependen tersebut. *Network society* menjelaskan infrastruktur jaringan yang memungkinkan arus modal sosial, komunikasi, dan kapasitas mengalir lebih efisien melampaui batas-batas fisik komunitas, sementara *digital citizenship* mendefinisikan standar normatif partisipasi warga dalam jaringan tersebut. Hubungan keempat elemen ini dapat digambarkan dalam kerangka konseptual berikut:

Tabel 1. *Kerangka Konseptual Integrasi Modal Sosial, Komunikasi, Capacity Building, Network Society, dan Digital Citizenship dalam Program KLK*

Dimensi	Landasan Teoretis	Indikator Utama	Wujud dalam Program KLK
Modal Sosial	Putnam (1993); Risal <i>et al.</i> (2025)	Kepercayaan, jaringan bonding & bridging, norma	Kohesivitas warga Ketawanggede; relasi warga–mahasiswa- pendamping/dosen Forum SDGs, Rembuk Pawon, Kampung Budoyo
Komunikasi Pembangunan	Leeuwis (2013); Juwita <i>et al.</i> (2025)	Media digital, interpersonal, hibrida; difusi inovasi	WhatsApp, Tiktok, media sosial, Podcast UBTV, youtube, pertemuan warga, pendampingan lapangan
Capacity Building	Deprez <i>et al.</i> (2023); Wieszczeczynska (2024)	Penguatan keterampilan, kelembagaan, kesehatan, kepemimpinan, adaptasi	Pelatihan, pendampingan sertifikat halal, pemberdayaan potensi lokal UMKM

Network Society	Castells (2010)	Jaringan digital sebagai infrastruktur sosial; switcher antarjaringan	Mahasiswa dan PIC Program, Pemerintah Kelurahan sebagai switcher; Program KLK sebagai <i>networked social practice</i>
Digital Citizenship	Mossberger et al. (2008)	Kapasitas partisipasi digital; produksi pengetahuan komunal	Kompetensi digital warga; dokumentasi & kolaborasi daring

Sumber: Sintesis penulis dari berbagai literatur dan Juknis KLK, 2026.

Kerangka konseptual tersebut menunjukkan bahwa kelima dimensi bekerja dalam sistem yang saling menguatkan. Dalam Program KLK, ketiadaan sinergi antara dimensi-dimensi ini bisa menjadi sumber hambatan: ketika kepercayaan antara warga dan mahasiswa serta pendamping rendah (modal sosial lemah), informasi tidak mengalir dengan baik melalui jaringan (*network society* tidak berfungsi optimal), kapasitas kemampuan digital warga tidak berkembang (*digital citizenship* stagnan), dan *capacity building* tidak bertumbuh secara organik. Sebaliknya, ketika modal sosial kuat, komunikasi efektif, jaringan digital dimanfaatkan secara produktif, dan *digital citizenship* warga terus berkembang, keempat elemen bersinergi menciptakan ekosistem pemberdayaan yang resilient dan berkelanjutan. Pada program KLK, integrasi tersebut menjadi krusial mengingat sifat program yang kolaboratif. Harapan dari Program KLK bisa menjadi konsep sabuk pengaman sosial institusi universitas. Mampu sebagai kerangka zona penyangga dinamis yang bertumpu pada empat pilar utama: pemberdayaan SDM dan pendidikan, penguatan ekonomi lokal dan UMKM, peningkatan infrastruktur dan lingkungan, serta penguatan sosial dan kelembagaan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa modal sosial, komunikasi, dan *capacity building* merupakan tiga elemen utama yang saling berkaitan dalam mendukung keberhasilan Program Kampung Lingkar Kampus (KLK) di Kelurahan Ketawanggede Kota Malang. Modal sosial berperan sebagai fondasi melalui kepercayaan, jaringan, dan norma yang memperkuat kolaborasi antar aktor, sementara komunikasi menjadi sarana penghubung dalam proses interaksi dan transfer pengetahuan. *Capacity building* merupakan upaya peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian pemberdayaan masyarakat dengan menawarkan kerangka konseptual integratif yang menghubungkan modal sosial, komunikasi, *capacity building*, jaringan digital, dan kewargaan digital dalam satu model yang koheren. Kebaharuan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi perspektif *network society* dan *digital citizenship* ke dalam kajian modal sosial dan *capacity building* dalam konteks program pengabdian universitas–komunitas sekitar kampus di Indonesia, yang belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya.

PENGAKUAN

Tulisan ini merupakan bagian dari luaran Program Kampung Lingkar Kampus berupa publikasi di media atau jurnal.

REFERENSI

- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Carmen, E., Fazey, I., Ross, H., Bedinger, M., Smith, F. M., Prager, K., McClymont, K., & Morrison, D. (2022). Building community resilience in a context of climate change: The role of social capital. *Ambio*, 51(6), 1371–1387.
- Castells, M. (2010). The rise of the network society: The information age: Economy, society, and culture (Vol. 1, 2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Chen, H. C., Lin, T. C., & Chen, Y. H. (2025). The impact of social capital and community empowerment on regional revitalization practices: A case study on the practice of university social responsibility programs in Wanli and Jinshan Districts. *Sustainability*, 17(10), 4653.
- Costin, B. U. T. A. (2025). The impact of communication on collaborative innovation in complex business environments. *Proceedings of the International Conference on Business Excellence*, 19(1), 747–760.
- Deprez, D., Busch, A. J., Ramirez, P. A., Pedrozo Araque, E., & Bidonde, J. (2023). Capacity-building and continuing professional development in healthcare and rehabilitation in low-and middle-income countries—a scoping review protocol. *Systematic Reviews*, 12(1), 22.
- Dulkiah, M. (2025). Social capital on community development: Survey in West Java Indonesia. *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, 7(1), 161–176.
- Enderle, S. (2024). ‘Everything is different here...’: The effects of mismatched mobility cultures and differential capacities on the urban vélomobility practices of refugee and asylum seeking women in Germany. *Travel Behaviour and Society*, 36, 100771.
- Fatimah, Suparman, Arsyad, & Mandjarreki, S. (2025). Komunikasi digital dan pemberdayaan sosial: Analisis penggunaan media sosial pada komunitas lokal. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 26(1).
- Fauzan, M., Purwanto, E., Jupri, H. D. N., & Dewi, P. S. (2025). Media sebagai agen perubahan komunitas di era teknologi digital. *Jurnal Bisnis dan Komunikasi Digital*, 2(4), 15.
- Handayani, dkk. (2023). Communication strategy failure and innovation diffusion barriers in community programs. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(2), 89–104.
- Juwita, R., Rohmah, A. N. M., & Arsyad, A. W. (2025). Fostering collaborative growth: Strategic communication and capacity building in PEKKA women’s entrepreneurial projects. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 4, 75–90.
- Laila, A. N., & Sugito. (2025). Social capital as a catalyst for community empowerment: Evidence from KWT Srikandi Mrican, Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(1), 1–12.
- Leeuwis, C. (2013). Communication for rural innovation: Rethinking agricultural extension. John Wiley & Sons.
- Lestari, A. I., Eklemis, K. E., & Abdullah, T. (2025). Hubungan modal sosial dengan tingkat partisipasi anggota BUMDes Kecamatan Wedi, Klaten, Jawa Tengah. *Journal of Agricultural Social and Business*, 4(2), 79–85.

- Mossberger, K., Tolbert, C. J., & McNeal, R. S. (2008). Digital citizenship: The Internet, society, and participation. MIT Press.
- Mozin, S. Y., & Abdussamad, S. N. (2025). Peran partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Ibarat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 8920–8926.
- Nguyen, H. T., & Nguyen, Q. L. H. T. (2025). Measuring bonding, bridging and linking dimensions of social capital: The case of city dwellers in Vietnam. *Cogent Social Sciences*, 11(1), 2490676.
- Nurdin, M., & Baharuddin, T. (2023). Capacity building challenges and strategies in the development of new capital city of Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 15(2), 221–232.
- Octory, G., & Rusadi, U. (2025). Sinergi difusi inovasi dan partisipasi dalam ekosistem komunikasi digital UMKM pengrajin Setu Tangerang Selatan. *Communicology. Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 239–252.
- Philip, E., Walsh, A., Jewitt, S., Conroy, R. M., & Stanistreet, D. (2025). Impact of community-based participatory research on capacity building: Findings from a household and ambient air project. *Sustainable Futures*, 10, 101139.
- Risal, S., Naufal, M., & Ulhaq, M. J. (2025). Modal sosial (norma, jaringan, dan kepercayaan): Pemberdayaan masyarakat di Pasar Mustokoweni dalam mengembangkan UMKM di Yogyakarta. *Pekerjaan Sosial*, 23(2).
- Rizky, R., Natasya, A. H., Oktavia, E. B., Setiawan, H. B., Prasetyo, A., & Pratama, S. (2026). Aktualisasi nilai gotong royong sebagai solusi problematika individualisme di era digital: Studi literatur perspektif etnososial. *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, 1(03), 256–260.
- Sadad, A., Tua, H. R. R., Meilani, N., Meiwanda, G., Amri, K., & Putra, I. M. (2024). Penerapan social capital dalam pengembangan inovasi pelayanan pemerintahan di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. *Community Development Journal*, 5(6), 11579–11583.
- Syarifuddin, D. (2025). Modal sosial dan dinamika pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa wisata berkelanjutan. *Jurnal Paradigma: Journal of Sociology Research and Education*, 6(1), 37–52.
- Tripathi, S. (2025). Enhancing community consensus in Oman tourism: A communication approach. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 13(1), 1–17.
- Universitas Brawijaya. (2026). Petunjuk teknis pelaksanaan program prioritas rektor 2026 kegiatan Program Kampung Lingkar Kampus (KLK). Malang: Universitas Brawijaya.
- Wieszczechzynska, K. A., Tollin, N., & Spaliviero, M. (2024). Capacity building within urban climate resilience in the Global South—a literature review. *Frontiers in Sustainable Cities*, 6, 1380936.
- Wijayanti, A. T., Rahman, R. N., Kultsum, U., & Zalfa, A. N. (2025). Modal sosial dalam penguatan solidaritas dan kolaborasi di lingkungan organisasi mahasiswa. *Jurnal Humanitaria: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2).
- Zubaidah, S., Hermansyah, H., Indah, V. F., Laili, R., Yuniarti, Y., & Saleh, H. M. (2024). Dampak pemberdayaan masyarakat terhadap partisipasi pembangunan infrastruktur pedesaan di Pedamaran Timur, Ogan Komering Ilir. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 7(1), 69–86.